

SKRIPSI

**PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAN MAKANAN
YANG LAYAK BAGI HAK NARAPIDANA MENURUT UU NO 12
TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN
(Studi Di Lapas Klas II B Muaro Sijunjung)**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

ASHABI BULLAH ALHAS

1210113062

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)

Pembimbing :

- 1. Prof. Dr. Elwi Danil S.H, M.H**
- 2. Nelwitis S.H, M.H**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2016**

“PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAN MAKANAN YANG LAYAK BAGI HAK NARAPIDANA MENURUT UU NO 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN”

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muaro Sijunjung)

(Ashabi Bullah Alhas, 1210113062, 65+v halaman, Fak. Hukum Universitas Andalas, 2016)

ABSTRAK

Masalah kesehatan dan makanan yang diderita oleh warga binaan selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, merupakan masalah yang sangat penting. Masalah kesehatan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muaro Sijunjung dikarenakan beberapa faktor diantaranya yaitu: kekurangan sumber daya manusia, terlambatnya diteksi kasus, ketidaktepatan pengobatan terhadap penyakit yang diderita oleh warga binaan, kurang higienis dan sanitasi yang buruk, serta tidak cukupnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk biaya pengobatan warga binaan. Sebagaimana sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, berdasarkan Pasal tersebut bahwa warga binaan memiliki Hak dalam memperoleh Pelayanan Kesehatan Dan Makanan yang Layak. Serta mengenai tata cara pelaksanaan hak warga binaan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini yaitu: (a) Bagaimana pelaksanaan jaminan kesehatan dan makanan yang layak bagi hak warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muaro Sijunjung berdasarkan Undang-undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, (b) Apakah hambatan atau kendala yang dihadapi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muaro Sijunjung dalam pelayanan kesehatan dan makanan yang layak terhadap warga binaan berdasarkan Undang-undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yaitu yuridis sosiologis. Penulisan ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang dilakukan terhadap kondisi yang telah ada dan sedang berjalan untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan di lapangan se jelas-jelasnya. Adapun hasil dari penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan di Lapas merupakan hak setiap warga binaan. Pelayanan Kesehatan dilaksanakan dalam dua bentuk yaitu: pelayanan kesehatan bersifat segera dan pelayanan kesehatan bersifat rutin dan dalam pemberian makanan terhadap warga binaan telah sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No M.HM-01.P.K.07.2 Tahun 2009. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yaitu kurangnya tenaga kesehatan di Lapas Klas II B Muaro Sijunjung. Dan kurangnya anggaran untuk makan yang diberikan pemerintah untuk Lapas. Upaya yang dilakukan pihak Lapas yaitu melakukan pelelangan kepada pihak swasta.